BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintah di daerah, pembangunan daerah, dan meamberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintah yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan value for money yang benar.Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan, masyarakat, keamanan penegakan hukum, transportasi publik, insfrastuktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik misalnya yaitu seperti penyediaanbahan kebutuhanpokok masyarakat.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntunan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan penerapan hukum secara berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuennya di keluarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola kepemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akutansi Single Entrydan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan seta potensi dan keanek ragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalahsatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.Di lihat dari Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

UIN
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik.Hal tersebut sangat wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi.Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk membantu mereka.Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Garut antara lain, ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relati kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, Kurangnya usaha dan kemampuan Penerimaan Daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, Inefesiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berikut ini tabel 1.1 yang menunjukan Data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Trasnfer Kabupaten Garut tahun anggaran 2014-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2016.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	%
2014	324.329.660.481,00	2.639.582.832.771,00	12.28
2015	392.357.893.451,00	3.228.823.822.847,00	12.15
2016	427.865.899.432,35	3.429.289.323.064,00	12.47

Sumber Data: LRA Kabupaten Garut Tahun 2014-2016.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014-2016.
(sebagai pembanding)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	%
2014	253.450.505.778,21	1.163.506.296.816,00	21.78
2015	242.979.820.517,50	1.361.670.047.708,00	17.84
2016	270.957.500.536,00	1.352.579.393.538,00	20.03

Sumber Data: LRA Kabupaten Tasik Tahun 2014-2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dilihat dari hasil tabel 1.1 ternyata pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Garut pada tahun anggaran 2014-2016 cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusatnya, sehingga tingkat kemandirian kabupaten Garut pada tahun anggaran 2014-2016 berada pada rendah sekali, yaitu 12.28%, 12.15%, dan 12.47%. Sedangkan terlihat pada tabel 1.2 pendapatan asli daerah kabupaten Tasikmalaya pada tahun anggaran 2014-2016 menunjukan sama saja seperti kabupaten Garut yang lebih besar pendapatan transfer dibandingkan pendapatan asli daerahnya,

sehingga tingkat kemandirian kabupaten Tasikmalaya menunjukan rendah sekali, yaitu 21.78%, 17.84%, dan 20.03%. Bisa dilihat dalam tabel 1.2 Tasikmalaya lebih besar dalam persenan kemandiriannya dibandingkan dengan Kabupaten Garut tetapi masih saja dikatakan rendah karena belum bisa mandiri. Untuk mengetahui hal tersebut bisa dilihat dalam kriteria kemandirian keuangan daerah dibawah ini.

Tabel 1.3
Pola Hubungan dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2016.

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2004:189)

Dilihat dari tabel 1.2 acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif*, pola hubungan *konsultatif*, pola hubungan *partisipatif* dan pola hubungan *delegatif*. Yang pertama pola hubungan *instruktif*, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Kedua, pola hubungan *konsultatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Keempat, pola hubungan *delegatif* yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut berada pada kriteria rendah sekali, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang paling penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak pun merupakan hal yang paling penting. Namun Pemerintah Kabupaten Garut kurang ketat dalam penagihan pajak seperti pajak hotel dan restoran. Selama ini industri pariwisata menjadi andalan kabupaten garut dengan adanya objek alam, air panas, kuliner dan wisata berbasis alam. Seiring itu tumbuh usaha perhotelan dan restoran yang seharusnya menjadi sumber pendapatan pajak daerah. Sehingga, Pajak hotel dan restoran tidak seharusnya berkontribusi rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah hotel dan restoran masih rendah.

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Garut yaitu Rudi Gunawan mengatakan bahwa “Kontribusi hotel dan restoran di Garut terhadap PAD sangat kecil. Pendapatan pajak dari hotel dan restoran hanya Rp. 11 Miliar per tahun. Untuk pajak makanan saja hanya Rp. 3 Miliar”. (Tribun Jabar, Selasa 28 Juli 2015- 15:45 WIB).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2016"

B. Identifikasi Masalah

Menganalisa Kinerja Keuangan di Indonesia menggungkapkan beberapa permasalahan di bidang keungan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, yaitu:

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil di bandingkan Pendapatan Transfer.
2. Rendahnya kontribusiKabuparen Garut terhadap Pendapatan asli Daerah.

C. Rumusan Masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sehubungan dengan masalah penelitian ini maka penulis menyampaikan pertanyaan penelitian (*research question)* : Bagaimana kemandirian kinerja keuangan daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2016 ditinjau dari Rasio Kemandirian?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2016?

E. Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Garut dengan menerapkan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoretis**

   Secara Teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut ditinjau dari Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efesiensi Keungan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Dan kemudian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memeberikan referensi atau sambungan pemikiran Pemerintah Daerah di dalam menganalisis Kemandirian Keuangan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

   b. Bagi peneliti, peneliti ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan berpengaruh penerapan teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kemendirian Pemerintah Kabupaten Garut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG